



LAPORAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP

SEKRETARIAT JENDERAL DAFTAR
BADAN KEAHLIAN
DPR - RI

<https://rb.dpr.go.id/>

Kata Pengantar



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan hidayahNya sehingga terselesaikannya Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Laporan ini disusun dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan atas evaluasi pelaksanaan SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/86/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Sekretariat Jenderal sebagai *supporting system* bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi untuk mendukung tercapainya visi DPR RI sebagai Lembaga yang modern, terbuka, aspiratif dan berintegritas.

Januari, 2022

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197210181992031002

LAPORAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP

A. PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Kementerian PAN dan RB 88 Tahun 2021 terkait evaluasi SAKIP, pada bulan September tahun 2021 telah dilakukan evaluasi terhadap SAKIP Setjen DPR RI dengan nilai perolehan sebesar 65,31, meningkat sebesar 0,41 bila dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil penilaian yang diperoleh terdiri dari 5 komponen dengan nilai sebagai berikut di bawah.

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,41	20,45
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,66	15,68
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,93	9,95
d.	Evaluasi Internal	10	6,94	6,94
e.	Capaian Kinerja	20	11,96	12,29
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,90	65,31
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KemenPAN-RB memberikan rekomendasi atas pelaksanaan implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI yakni:

1. Melakukan revisi Renstra Setjen dan BK DPR RI 2020-2024, terutama memasukkan informasi mengenai Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target 2020-2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai;
2. Untuk penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya agar memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan;
3. Setiap tahun menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada PK pada unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id;
4. Mendorong Laporan Kinerja Deputy, Inspektorat Utama, dan Badan Keahlian setiap tahunnya dipublikasikan/diunggah (*upload*) ke [website dpr.go.id](http://website.dpr.go.id);
5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINCAN untuk kinerja organisasi, dan aplikasi PPKP untuk kinerja pegawai, sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala;
6. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
7. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga

betul-betul dapat diimplementasinya dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, Setjen DPR RI telah menindaklanjuti evaluasi tersebut.

B. TINDAK LANJUT

01 Rekomendasi 1

“Melakukan revisi Renstra Setjen DPR RI 2020-2024, terutama memasukkan informasi mengenai Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan target 2020-2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai.”

Setjen DPR RI telah melakukan revisi terhadap Renstra Setjen DPR RI 2020-2024, dengan melengkapi Sasaran Strategis beserta indikatornya.

Devan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan juknis pelaksanaan visi ke dalam tugas sebagai acuan dalam merencanakan pelaksanaan kewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Misi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan perundangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislatif yang lengkap.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis.

a. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atau Dukungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tabel 3. Sasaran Program 1

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atau dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atau Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	7,50	7,50	7,50	7,50

b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas

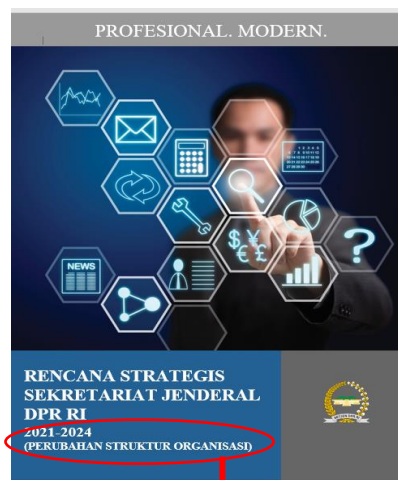
Tabel 4. Sasaran Program 2

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas:	1. Indeks Performansi Birokrasi	BB	A	A	AA
	2. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	A	A	A
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	W/P	W/P	W/P	W/P
	4. Hasil penilaian maturitas SPK	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil penilaian kapabilitas APD	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WSK	4	6	8	10
	7. Jumlah program iklim dengan hasil strategis minimal "B"	1	1	1	1
8. Hasil "Pengawasan Keuangan Lembaga DPR"	BB	A	A	A	

c. Terwujudnya Keterbacaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 5. Sasaran Program 3

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbacaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian website informasi online	Baik	Baik	Baik	Baik
	2. Indeks Pelaksanaan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Baik



02 Rekomendasi 2

“Untuk penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya agar memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pada tanggal 21 Desember 2021, bertempat di Ruang Sidang Banggar DPR RI, telah diadakan Penyerahan DIPA T.A. 2022 serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan SKP 2022 oleh Bapak Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI) serta para Eselon I dan Eselon II Setjen DPR RI.



03 Rekomendasi 3

“Setiap tahun Menyusun Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada PK pada unit kerja terkecil, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id.”

Pada tanggal 9 September 2021, disampaikan pengumuman agar seluruh Eselon I dan II agar menyusun Rencana Aksi atas PK, dan dari hasil pengumuman tersebut terkumpul

rencana aksi eselon I dan II. Sebagai contoh, berikut dibawah ini adalah rencana aksi PK 2021 dari Biro Organisasi dan Perencanaan.

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
J.L. JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 345 FAX (021) 5715 423 / 5715 929 WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/883/PI.03.02/09/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Tidak terlampir Hasil Evaluasi SAKIP

Yth. Para Pejabat Tinggi Pratama
di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
Jakarta

Daerah rangka menindaklanjuti hasil Evaluasi dari Kemen PANRB terkait SAKIP dimana salah satu rekomendasinya adalah membuat Rencana Aksi Kinerja sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja (PK). Untuk itu kami mohon agar Para Pejabat Tinggi Pratama dapat membuat Rencana Aksi Kinerja tersebut guna memenuhi rekomendasi dari KemenPan RB. Rencana Aksi Kinerja dimaksud dapat dikirimkan hard copy atau ke email Bagan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi yaitu : bdpr2021@gmail.com paling lambat tanggal 17 September 2021 (format rencana aksi terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan/
Koordinator Area Perubahan 6,
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., Ph.D.

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal
2. Deputi Bidang Persidangan
3. Kepala Badan Keahlian Dewan
4. Inspektur Utama
5. Pk. Deputi Bidang Administrasi
6. Ketua Tim Pelaksana RB

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN TAHUN 2021															
No.	Indikator Kinerja	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Eviden
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	20,41													
	Rencana Aksi:														
	a. Membuat Dashboard Manajemen Informasi Kinerja (MIKIR) Anggaran dan Output														
	b. Penambahan fitur Target Output di aplikasi SINCAN														
2.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	15,66													
	Rencana Aksi:														
	a. Membuat Dashboard Manajemen Informasi Kinerja (MIKIR) Anggaran dan Output														
	b. Pengembangan aplikasi SiCaput (Sistem Informasi Capaian Output)														
	c.														
3.	Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	9,93													
	Rencana Aksi:														
	a. Membuat Dashboard Manajemen Informasi Kinerja (MIKIR) Anggaran dan Output														
	b. Menampilkan sub menu Renstra, Laporan Kinerja, PK di website DPR														
4.	Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan	95%													
	Rencana Aksi:														
	a. Melakukan percepatan kegiatan di triwulan ke-III														
	b. Melakukan optimalisasi anggaran yang tidak terserap														
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52													
	Rencana Aksi:														
	a. Membuat Dashboard Manajemen Informasi Kinerja (MIKIR) Anggaran dan Output														
6.	Nilai Kinerja Organisasi	4,63													
	Rencana Aksi:														
	a. Melaksanakan penelaahan dan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal														
	b. Melaksanakan penataan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal														
	c. Melakukan penataan dan revisi Peta Proses Bisnis dan sinkronisasi SOP dengan Peta proses Bisnis di lingkungan Setjen DPR RI														
	d. Penyusunan Metadata ketatalaksanaan dan database Proses Bisnis, SOP serta Standar Pelayanan														

Telah tersedia fitur Rencana Aksi di Aplikasi PK/PPKP. Dibawah ini adalah contoh rencana aksi PK dari Biro Organisasi dan Perencanaan.

e - PPKP Annisa Putri Nasyih [user.perencanaan] Log Out Portal

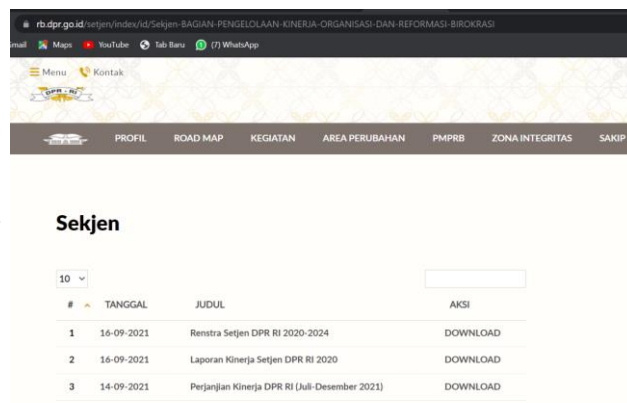
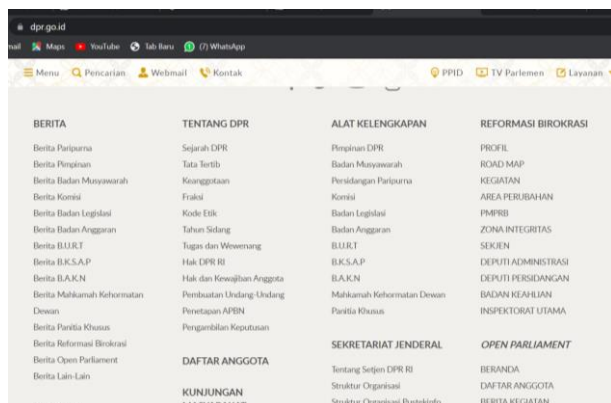
Rencana Aksi PK

Indikator	Target	Rencana Aksi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
(1-1) Nilai komponen perencanaan Kinerja pada nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR [TAMBAH-RENAKSI]	20,41	(1-1-1) Membuat Dashboard Manajemen Informasi Kinerja (MIKIR) Anggaran dan Output [EDIT] [HAPUS]												
		(1-1-2) Penambahan fitur Target Output di aplikasi SINCAN [EDIT] [HAPUS]												
(1-2) Nilai komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR [TAMBAH-RENAKSI]	15,66	(1-2-1) Membuat Dashboard Manajemen Informasi Kinerja (MIKIR) Anggaran dan Output [EDIT] [HAPUS]												
		(1-2-2) Pengembangan aplikasi SiCaput (Sistem Informasi Capaian Output) [EDIT] [HAPUS]												
(1-3) Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR [TAMBAH-RENAKSI]	9,93	(1-3-1) Membuat Dashboard Manajemen Informasi Kinerja (MIKIR) Anggaran dan Output [EDIT] [HAPUS]												
		(1-3-2) Menampilkan sub menu Renstra, Laporan Kinerja, PK di website DPR [EDIT] [HAPUS]												
(1-4) Persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan [TAMBAH-RENAKSI]	95	(1-4-1) Melakukan percepatan kegiatan di triwulan ke-III [EDIT] [HAPUS]												
		(1-4-2) Melakukan optimalisasi anggaran yang tidak terserap [EDIT] [HAPUS]												
(2-1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan [TAMBAH-RENAKSI]	7,52	(2-1-1) Membuat Dashboard Manajemen Informasi Kinerja (MIKIR) Anggaran dan Output [EDIT] [HAPUS]												
(2-2) Nilai Kinerja Organisasi [TAMBAH-RENAKSI]	4,63	(2-2-1) Melaksanakan penelaahan dan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal [EDIT] [HAPUS]												
		(2-2-2) Melaksanakan penataan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal [EDIT] [HAPUS]												
		(2-2-3) Melakukan penataan dan revisi Peta Proses Bisnis dan sinkronisasi SOP dengan Peta proses Bisnis di lingkungan Setjen DPR RI [EDIT] [HAPUS]												
		(2-2-4) Penyusunan Metadata ketatalaksanaan dan database Proses Bisnis, SOP serta Standar Pelayanan [EDIT] [HAPUS]												

04 Rekomendasi 4

“Mendorong Laporan Kinerja Deputi, Inspektorat utama, dan Badan Keahlian setiap tahunnya dipublikasikan/diunggah (*upload*) ke website *dpr.go.id*.”

Telah dipublikasikan Laporan Kinerja Eselon I ke website *dpr.go.id*. Selain Laporan Kinerja tahunan, juga dipublikasikan Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi PK.

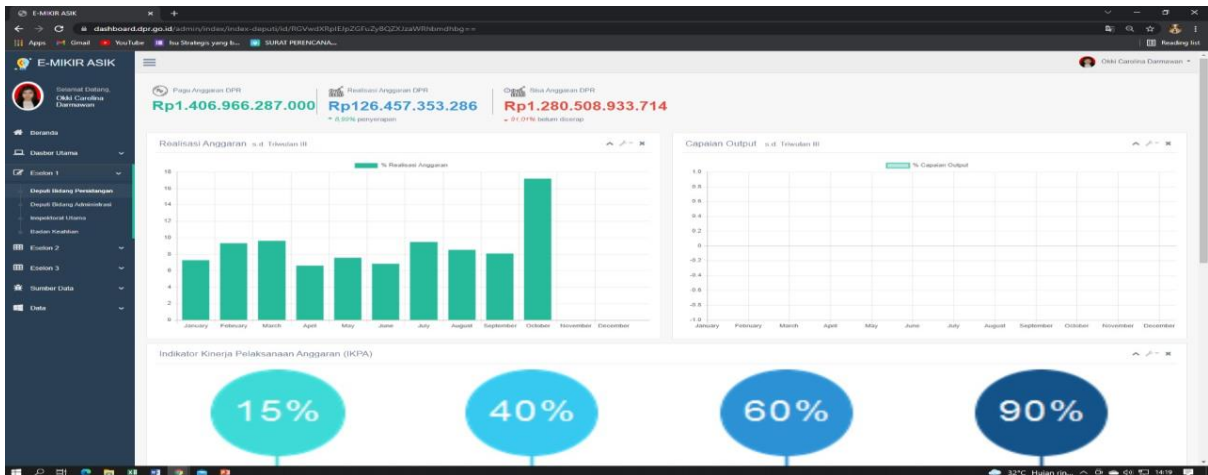


05 Rekomendasi 5

“Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SINCAN untuk kinerja organisasi, dan aplikasi PPKP untuk kinerja pegawai, sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.”

Untuk menindaklanjuti PP No.30 Tahun 2019, sejak pertengahan tahun 2021, penggunaan aplikasi PPKP yang semula digunakan untuk perhitungan kinerja pegawai akan beralih ke aplikasi milik BKN.

Untuk melakukan monev capaian kinerja di internal kesetjanaan, telah dibangun dashboard Elektronik Manajemen Informasi Kinerja Anggaran Terintegrasi dengan Keluaran/Output (e-MIKIR ASIK). E-MIKIR ASIK memuat data realisasi anggaran dan capaian output di depan portal masing-masing Eselon I dan Eselon II. Tampilan tersebut dapat dilihat di *dashboard.dpr.go.id*. Data tersebut akan memudahkan pimpinan Lembaga dan unit kerja untuk memantau kinerja sehingga dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.



06 Rekomendasi 6

“Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.”

Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan secara berkala. Umumnya dilaksanakan bersamaan dengan rapat RB, yaitu hari Rabu.



07 Rekomendasi 7

“Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Setjen DPR RI.

Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.”

Pada tanggal 8 – 12 November 2021, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengadakan diskusi dengan Kementerian PAN & RB di hotel Santika Jakarta dan Wisma Griya Sabha Kopo untuk menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



Pada tanggal 3 Mei 2021 s.d. 7 Mei 2021, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan PK dan SKP.

JADWAL TENTATIF BIMTEK PENYUSUNAN PK DAN SKP
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2021
RUANG RAPAT KK II GEDUNG NUSANTARA DPR RI

Hari/Tanggal	Waktu	Materi	Pengajar/Fasilitator	Biro/Inspektori/Pusat	Zoom Meeting
Senin, 3 Mei 2021	08.30 – 09.00	Pembukaan Pelatihan 1. Menyajikan Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Sambutan dan Pembukaan oleh Kero SDMA	Tim Penyelenggara	Seluruh Peserta Bimtek melalui Virtual Meeting	ID: 9345077 2833 Passcode: 441218
	09.00 – 09.20	Pemaparan Tutorial Evaluasi Pelatihan	Kabid Pelatihan Teknis		
	09.20 – 11.35	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Setjen DPR RI (3 JP)	Bagian Organisasi dan Tata Laksana		
	11.35 – 12.30	Rahat			
	12.30 – 14.45	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Dedy Bagus Prakasa (PK) 2. Rita Komariah (SKP) 3. Sukma Angraita (SKP) 4. Ibrahim (SKP)		
Selasa, 4 Mei 2021	09.00 – 11.15	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Dedy Bagus Prakasa (PK) 2. Siti Hasnahwati (SKP) 3. Rizki Indra Kumawan (SKP) 4. Sri Reski (SKP)	Inspektori I, Inspektori II, Inspektori Utama dan Biro Pemberitaan Parlemen	ID: 9887563 9933 Passcode: 152993
	11.15 – 12.30	Rahat			
	12.30 – 14.45	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Pradnadi Saktoseo D.I. (PK) 2. Johansyah Febriyanto (SKP) 3. Nalla Anasya (SKP) 4. Muhammad Allan (SKP)	Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	
Rabu, 5 Mei 2021	09.00 – 11.15	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Dedy Bagus Prakasa (PK) 2. Rita Komariah (SKP) 3. Sukma Angraita (SKP) 4. Ibrahim (SKP)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Kepegawaian dan Organisasi	ID: 9614734 4257 Passcode: 938473

Hari/Tanggal	Waktu	Materi	Pengajar/Fasilitator	Biro/Inspektori/Pusat	Zoom Meeting
	11.15 – 12.30	Rahat			
	12.30 – 14.45	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Pradnadi Saktoseo D.I. (PK) 2. Siti Hasnahwati (SKP) 3. Rizki Indra Kumawan (SKP) 4. Sri Reski (SKP)	Biro Pengelolaan BMN dan Biro Umum	
Kamis, 6 Mei 2021	09.00 – 11.15	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Dedy Bagus Prakasa (PK) 2. Johansyah Febriyanto (SKP) 3. Nalla Anasya (SKP) 4. Muhammad Allan (SKP)	Biro Protokol dan Biro KSAP	ID: 9784759 4955 Passcode: 308960
	11.15 – 12.30	Rahat			
	12.30 – 14.45	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Pradnadi Saktoseo D.I. (PK) 2. Rita Komariah (SKP) 3. Sukma Angraita (SKP) 4. Ibrahim (SKP)	Pusdiklat dan Pusdatin	
Jumat, 7 Mei 2021	09.00 – 11.15	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Dedy Bagus Prakasa (PK) 2. Siti Hasnahwati (SKP) 3. Rizki Indra Kumawan (SKP) 4. Sri Reski (SKP)	Biro Persidangan II	ID: 952 8397 2784 Passcode: 921629
	11.15 – 13.00	Rahat			
	13.00 – 15.15	Penyusunan Perjanjian Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (3 JP)	1. Pradnadi Saktoseo D.I. (PK) 2. Johansyah Febriyanto (SKP) 3. Nalla Anasya (SKP) 4. Muhammad Allan (SKP)	Badan Keahlian	
	15.15 – 15.45	Penutupan	Tim Penyelenggara	Seluruh Peserta Bimtek melalui Virtual Meeting	

Pada tanggal 31 Agustus – 3 September 2021 telah dilakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi Agen Perubahan tahun 2021 Setjen DPR RI.

Be a "change maker" for something better



Laporan Kegiatan
Pelatihan Berbasis Kompetensi
AGEN PERUBAHAN (AGENT of CHANGE) - Th.2021
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
31 Agustus - 3 September 2021

TAK ADA LAGI POLA PIKIR LAMA, HARUS BERUBAH!

"Tidak ada lagi pola pikir lama! Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. HARUS BERUBAH!"

Presiden Jokowi
dalam pidato Visi Indonesia,
14 Juli 2019

Membangun Kompetensi Agen Perubahan sebagai :

Katalis

Penghubung

Pengggerak Perubahan

Mediator

Pemberi Solusi

Role Model

“ Do what you can, with what you have, where you are. Theodore Roosevelt ”

**SEKRETARIAT JENDERAL DAFTAR
BADAN KEAHLIAN
DPR - RI**

